

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2023

Mariani Sendrina Leoniva Nala^{1*}, Siti Fatimah²

^{1,2,3}Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Info Artikel	ABSTRAK
Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Realisasi APBD, Kinerja Keuangan Daerah	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lombok Barat selama periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap target anggaran, sedangkan efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan tahun 2019-2022 berturut-turut sebesar 97,12%, 91,86%, dan 98,01% (kategori cukup efektif), sedangkan tahun 2023 sebesar 89,13% (kategori kurang efektif). Tingkat efisiensi belanja tahun 2019 dan 2021 sebesar 97,50% dan 97,20% (kategori kurang efisien), tahun 2020 dan 2023 sebesar 89,59% dan 89,34% (kategori cukup efisien), serta tahun 2022 sebesar 100,69% (kategori tidak efisien). Kinerja pendapatan daerah tergolong cukup efektif, namun efisiensi belanja masih berfluktuasi sehingga diperlukan peningkatan pengendalian dan perencanaan anggaran.
Keywords:	ABSTRACT
<i>Effectiveness, Efficiency, Regional Budget Realization, Regional Financial Performance</i>	<i>This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) realization in West Lombok Regency during the 2019-2023 period. This study uses a descriptive quantitative approach with secondary data in the form of the Budget Realization Report (LRA) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). Effectiveness is measured by comparing revenue realization to budget targets, while efficiency is measured by comparing expenditure realization to budget expenditure. The results show that revenue effectiveness in 2019-2022 was 97.12%, 91.86%, and 98.01%, respectively (categorized as quite effective), while in 2023 it was 89.13% (categorized as less effective). The spending efficiency rate in 2019 and 2021 was 97.50% and 97.20% (categorized as less efficient), in 2020 and 2023 it was 89.59% and 89.34% (categorized as quite efficient), and in 2022 it was 100.69% (categorized as inefficient). Regional revenue performance is considered quite effective, but spending efficiency still fluctuates, necessitating improved budget control and planning.</i>

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan yang paling mendasar dalam pemenuhan kebutuhan program setiap institusi atau unit kegiatan adalah ketersediaan anggaran yang kemudian disalurkan pada setiap sisi program yang disediakan atau program yang direncanakan dengan melalui pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penata usaha/akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan. Melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa uang atau dana publik telah dibelanjakan secara efisien, dan efektif, dengan demikian susunan pemerintahan dari sistem lama sangat dibutuhkan guna terwujudnya pemerintahan yang dapat dikatakan baik dimana pemerintah pusat yang kuat dalam memutuskan kebijakan nya (Pappa et al., 2023).

Tabel 1. Data Rencana/Pagu Pendapatan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Rencana/Pagu Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (%)
2019	1.964,65	1.908,04	97,12
2020	1.840,98	1.687,93	91,69
2021	1.747,00	1.709,67	97,86
2022	1.767,31	1.732,19	98,01
2023	1.862,31	1.659,96	89,13

Sumber : DJPK.Kemenkeu

Kabupaten Lombok barat sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda gambaran nasional tersebut. Berdasarkan data realisasi APBD pada tabel 1, realisasi pendapatan daerah mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan mencapai Rp. 1.908,04 miliar atau 97,12%, meningkat menjadi 97,86% pada 2021 dan 98,01% pada tahun 2022, namun turun cukup tajam pada tahun 2023 dengan realisasi hanya sebesar 89,13%.

Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan performa pendapatan yang mengindikasikan bahwa optimalisasi sumber-sumber PAD maupun pendapatan daerah lain masih belum berjalan maksimal di Lombok Barat, dikatakan belum berjalan dengan maksimal karena yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi pendapatan yang dicapai, khususnya pada tahun 2023 yang hanya mencapai 89,13% kondisi ini menunjukkan bahwa

perencanaan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan target pendapatan. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, sehingga tingkat kemandirian fiskal Lombok Barat dapat dikatakan masih lemah, yang pada akhirnya turut mempengaruhi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan (Putra & Haris, 2020)

Tabel 2. Data Rencana/Pagu Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Rencana/Pagu Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (%)
2019	1.910,13	1.862,39	97,50
2020	1.991,28	1.784,07	89,59
2021	1.709,66	1.661,84	97,20
2022	1.728,71	1.740,59	100,69
2023	1.836,57	1.640,80	89,34

Sumber : DJPK.Kemenkeu

Pada tabel 2, realisasi belanja daerah juga menunjukkan pola yang tidak konsisten. Pada tahun 2019, realisasi belanja tercatat sebesar 97,50%, namun turun menjadi 89,59% pada tahun 2020 dan kembali mencapai tingkat optimal pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing 99,78% dan 100,69%. Sementara itu, tahun 2023 kembali mencatatkan penurunan signifikan dengan realisasi belanja hanya mencapai 89,34%. Ketidak konsistenan ini mengindikasikan adanya masalah pada tahapan perencanaan dan implementasi anggaran. Belanja yang rendah menunjukkan keterlambatan program pembangunan daerah, sementara belanja yang melampaui pagu menunjukkan potensi pemborosan anggaran dan lemahnya pengendalian fiskal. Selain itu, ketidakmampuan menyerap anggaran secara optimal terutama pada awal hingga pertengahan tahun anggaran menyebabkan program strategis sering tertunda dan menumpuk pada akhir tahun, sehingga meningkatkan risiko belanja yang tidak berkualitas (Wulandari, 2022).

Penelitian ini juga di dukung oleh teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan publik secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kepentingan masyarakat. Ketidakefisienan atau ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran dapat mencerminkan adanya masalah dalam tata kelola yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antar agen dan prinsipal. Konsep efektivitas dan efisiensi serta teori keagenan menjadi dasar penting dalam menganalisis kinerja pengelolaan APBD, karena

ketiganya saling berkaitan dalam mencerminkan kualitas perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Permasalahan umum yang dihadapi banyak pemerintah daerah adalah rendahnya penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran dan penumpukan realisasi pada akhir tahun. Hal ini sering kali disebabkan oleh lemahnya perencanaan, keterlambatan dalam proses administrasi, serta kurang optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (Rahmawati & Sari, 2022). Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan program, serta efisiensi penggunaan anggaran yang seharusnya dapat mendukung pelayanan publik lebih cepat.

Tantangan utama di kabupaten Lombok Barat terletak pada pengelolaan belanja modal yang sering kali mengalami keterlambatan realisasi akibat kendala teknis dan administratif. Permasalahan utama dalam efektivitas realisasi APBD di Lombok Barat adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, dimana target pendapatan seringkali overestimasi, menyebabkan defisit fiskal tahunan hingga 15% pada tahun 2021-2022. Efektivitas diukur dari pencapaian indikator kinerja, seperti rasio pertumbuhan ekonomi daerah yang hanya 4,5% meskipun alokasi belanja sebesar 50% untuk sektor ekonomi. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang mengakibatkan duplikasi program dan pemborosan. Selain itu, efisiensi rendah terlihat dari waktu penyelesaian belanja yang molor, dengan 30% anggaran terealisasi di akhir tahun fiskal. Data audit BPK tahun 2022 menemukan temuan ketidakefisienan senilai Rp. 150 miliar di Lombok Barat. Masalah ini tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Masalah-masalah tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketika realisasi anggaran tidak memberikan dampak nyata terhadap pembangunan atau pelayanan publik, kepercayaan masyarakat akan melemah. Dalam teori keagenan, hubungan antara masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat (*principal*) dan pemerintah sebagai pelaksana mandat (*agent*) sangat ditentukan oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi APBD bukan hanya persoalan teknis fiskal, tetapi juga persoalan legitimasi politik dan sosial.

Selain itu, perubahan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga menjadi konteks penting dalam penelitian ini. Banyak daerah mengalami penurunan pendapatan dan keterbatasan fiskal, termasuk Lombok Barat. Menurut BPS NTB (2023), pertumbuhan ekonomi Lombok Barat sempat turun menjadi 2,1% pada tahun 2020 sebelum kembali meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2023. Fluktuasi

ini berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam merealisasikan anggaran dan mengelola sumber daya secara efisien. Aspek efisiensi juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas publik. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu merealisasikan anggaran secara tepat waktu, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam hal ini, penelitian oleh Wulandari (2022) menegaskan pentingnya transparansi dan sistem pengawasan berbasis kinerja untuk meningkatkan efisiensi realisasi APBD.

Efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran juga dapat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Menurut Harahap dan Yusuf (2021), penerapan sistem ini di beberapa daerah telah meningkatkan efektivitas pelaksanaan program karena setiap kegiatan diukur berdasarkan hasil, bukan sekadar output keuangan. Namun, di Lombok Barat, penerapan sistem ini masih menghadapi kendala teknis dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas dan efisiensi realisasi APBD di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Kurniawan (2021) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah mencapai kategori sangat efektif, namun efisiensi belanja masih tergolong rendah akibat lemahnya pengawasan internal. Sementara itu, penelitian oleh Ningsih dan Lestari (2022) di Kabupaten Bandung mengungkapkan bahwa faktor kapasitas SDM dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran.

Di sisi lain penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas dan efisiensi realisasi APBD di Kabupaten Lombok Barat masih sangat terbatas. Studi yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat umumnya lebih menitikberatkan pada analisis pendapatan daerah atau kinerja fiskal secara parsial, tanpa mengintegrasikan kedua indikator tersebut dalam satu analisis yang komprehensif. Padahal efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja memiliki keterkaitan yang erat dalam mencerminkan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat *research gap* berupa belum adanya kajian yang secara simultan menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi APBD dalam satu kerangka analisis terpadu, khususnya pada kabupaten Lombok Barat dengan kondisi kinerja anggaran yang fluktuatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta melengkapi kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya..

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengukur

dan menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat dalam periode 2019-2023. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berbentuk angka yang dianalisis dengan prosedur statistik atau teknik pengukuran tertentu. Dalam penelitian ini, penggunaan data numerik dilakukan mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan, hingga interpretasi hasil penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan kondisi atau karakteristik suatu objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Suyono (2015), penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data berbentuk angka yang diperoleh dari dokumen dan laporan statistik guna menjelaskan fenomena ekonomi secara objektif dan terukur. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan, sehingga menarik untuk dianalisis dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025–2026, dengan periode data yang dianalisis mencakup tahun anggaran 2019–2023 untuk melihat tren dan fluktuasi realisasi APBD secara komprehensif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat yang diperoleh dari lembaga resmi. Menurut Ismiyanto (2021) dalam Lestari dan Nugraeni (2024), populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau dokumen yang memberikan informasi terkait penelitian. Dalam penelitian ini, populasi berupa data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kabupaten Lombok Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi seperti laporan keuangan, arsip, serta laporan statistik yang telah dipublikasikan. Menurut Sugiyono (2019), teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan realisasi anggaran yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), BPS Kabupaten Lombok Barat, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Pengukuran efektivitas dilakukan menggunakan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan PAD yang telah

dianggarkan. Rumus rasio efektivitas menurut Mahmudi (2019) adalah sebagai berikut :

a. Rasio Efektivitas

Rumus rasio efektivitas menurut Mahmudi (2019) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang dianggarkan}} \times 100\%$$

b. Kriteria Rasio Efektivitas

Tabel 3 Kriteria Rasio Efektivitas	
Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

Pengukuran efisiensi dilakukan menggunakan rasio efisiensi, yaitu perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Rumus rasio efisiensi menurut Mahmudi (2019) adalah sebagai berikut :

a. Rasio Efisiensi

Rumus rasio efisiensi menurut Mahmudi (2019) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

b. Kriteria Rasio Efisiensi

Tabel 3.2

Kriteria Rasio Efisiensi

Sumber : Mahmudi (2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas anggaran pendapatan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target atau rencana yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran (Mardiasmo, 2021).

Perhitungan Rasio efektivitas anggaran pendapatan di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 1.908,04}}{\text{Rp. 1.964,65}} \times 100\% = 97,12\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 1.687,93}}{\text{Rp. 1.840,98}} \times 100\% = 91,69\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 1.709,67}}{\text{Rp. 1.747,00}} \times 100\% = 97,86\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp. 1.732,19}}{\text{Rp. 1.767,31}} \times 100\% = 98,01\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{\text{Rp. 1.659,96}}{\text{Rp. 1.862,31}} \times 100\% = 89,13\%$$

Tabel 4. Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Rencana/Pagu Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efektifitas (%)	Kategori
2019	1.964,65	1.908,04	97,12	Cukup Efektif
2020	1.840,98	1.687,93	91,69	Cukup Efektif
2021	1.747,00	1.709,67	97,86	Cukup Efektif
2022	1.767,31	1.732,19	98,01	Cukup Efektif
2023	1.862,31	1.659,96	89,13	Kurang Efektif

Sumber : Data Penelitian diolah Tahun 2026

Berdasarkan tabel 4, rasio efektivitas anggaran pendapatan Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2023, diketahui bahwa pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 97,12%, tahun 2020 sebesar 91,69%, tahun 2021 sebesar 97,86%, dan tahun 2022 sebesar 98,01%, yang seluruhnya berada pada kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut pemerintah daerah relatif mampu merealisasikan pendapatan mendekati target yang telah ditetapkan dalam APBD. Namun pada tahun 2023 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 89,13% dan masuk dalam kategori kurang efektif. Penurunan ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan daerah belum mampu mencapai target yang telah direncanakan, sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah.

Menurut teori penganggaran sektor publik, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh overestimasi target pendapatan pada tahap perencanaan, yaitu penetapan target yang terlalu optimistis tanpa didukung potensi riil daerah dan data historis yang memadai, sehingga realisasi pendapatan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan (Halim, Kusufi, & Nugroho, 2020).

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi anggaran belanja daerah digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran belanja secara hemat dan optimal dibandingkan dengan pendapatan yang direalisasikan. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin efisien pengelolaan belanja daerah tersebut (Mardiasmo, 2021).

Perhitungan Rasio efisiensi anggaran belanja di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019-2023

adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 1.862,39}}{\text{Rp. 1.910,13}} \times 100\% = 97,50\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 1.784,07}}{\text{Rp. 1.991,28}} \times 100\% = 89,59\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 1.661,84}}{\text{Rp. 1.709,66}} \times 100\% = 97,20\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp. 1.740,59}}{\text{Rp. 1.728,71}} \times 100\% = 100,69\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{\text{Rp. 1.640,80}}{\text{Rp. 1.836,57}} \times 100\% = 89,34\%$$

Tabel 5. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Rencana/Pagu Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
2019	1.910,13	1.862,39	97,50	Kurang Efisien
2020	1.991,28	1.784,07	89,59	Cukup Efisien
2021	1.709,66	1.661,84	97,20	Kurang Efisien
2022	1.728,71	1.740,59	100,69	Tidak Efisien
2023	1.836,57	1.640,80	89,34	Cukup Efisien

Sumber: Data Penelitian diolah Tahun 2026

Berdasarkan tabel 5, rasio efisiensi anggaran belanja daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2023, diketahui bahwa pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 97,50% pada tahun 2021 sebesar 97,20% yang keduanya berada pada kategori kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja daerah relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang direalisasikan.

Pada tahun 2020 dan 2023, rasio efisiensi masing-masing sebesar 89,59% dan 89,34% yang termasuk dalam kategori cukup efisien, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian belanja daerah. Namun pada tahun 2022 rasio efisiensi mencapai 100,69% dan dikategorikan tidak efisien, yang berarti realisasi belanja daerah melebihi kemampuan pendapatan daerah pada tahun tersebut. Menurut literatur keuangan daerah, tingginya rasio efisiensi dapat menunjukkan adanya tekanan belanja daerah yang besar, baik akibat peningkatan belanja operasi maupun belanja prioritas tertentu yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan daerah (Sari & Pratolo, 2021).

a. Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Efektivitas realisasi anggaran pendapatan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efektivitas

tidak hanya mencerminkan keberhasilan pencapaian target pendapatan, tetapi juga mencerminkan kualitas perencanaan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang dimiliki (Mardiasmo, 2021). Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas anggaran pendapatan Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2023, diketahui bahwa pada periode 2019 hingga 2022 tingkat efektivitas berada pada kategori cukup efektif, dengan rasio efektivitas berada di atas 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan mendekati target yang telah ditetapkan dalam APBD. Namun demikian, capaian tersebut belum dapat dikategorikan sangat efektif karena realisasi pendapatan masih berada di bawah target anggaran.

Tingkat efektivitas yang cukup baik pada tahun 2019-2022 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, proses perencanaan anggaran yang relatif realistis dan didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, sehingga target pendapatan yang ditetapkan masih sesuai dengan potensi riil daerah. Kedua, adanya Upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, maupun lain-lain pendapatan yang sah. Ketiga, meskipun pada tahun 2020 terjadi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah daerah masih mampu menjaga stabilitas penerimaan daerah sehingga realisasi tetap berada di atas 90%. Pada tahun 2021 dan 2022, kondisi ekonomi yang mulai pulih turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah, sehingga berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pendapatan berjalan cukup efektif.

Penurunan tingkat efektivitas yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana rasio efektivitas hanya mencapai 89,13% dan masuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun tersebut tidak mampu memenuhi target yang telah direncanakan. Menurut literatur keuangan daerah, kondisi ini sering kali disebabkan oleh adanya overestimasi target pendapatan pada tahap perencanaan anggaran, yaitu penetapan target yang terlalu optimistis tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi riil daerah dan capaian pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya (Halim & Kusufi, 2020).

Selain itu, rendahnya efektivitas realisasi pendapatan juga dapat dikaitkan dengan masih terbatasnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat menyebabkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal menjadi terbatas. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang menyatakan bahwa daerah dengan PAD yang relatif rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD (Putri & Adi, 2022).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berupaya merealisasikan pendapatan daerah secara optimal, masih terdapat kelemahan pada aspek perencanaan dan optimalisasi sumber-sumber PAD, yang berdampak pada belum tercapainya tingkat efektivitas yang maksimal.

b. Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Efisiensi realisasi anggaran belanja daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara hemat untuk menghasilkan output pembangunan yang optimal. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efisien menunjukkan hubungan antara input berupa anggaran belanja dengan output berupa hasil pembangunan dan pelayanan publik yang dicapai (Mahmudi, 2021). Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi anggaran belanja kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2023, diketahui bahwa tingkat efisiensi belanja daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2021, rasio efisiensi berada pada kategori kurang efisien, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang direalisasikan.

Penyebab kondisi ini dapat dikaitkan dengan tingginya kebutuhan belanja rutin maupun belanja pembangunan yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, kemungkinan adanya perencanaan program yang kurang berbasis prioritas serta belum optimalnya pengendalian biaya juga dapat menyebabkan belanja menjadi relatif tinggi.

Pada tahun 2022, rasio efisien bahkan mencapai lebih dari 100% dan masuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini berarti realisasi belanja daerah melebihi kemampuan pendapatan daerah pada tahun tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan fiskal karena pemerintah daerah membelanjakan anggaran melebihi pendapatan yang diterima, sehingga berpotensi menimbulkan defisit anggaran atau ketergantungan pada pembiayaan daerah. Menurut teori keuangan publik, kondisi belanja yang melebihi kapasitas pendapatan mencerminkan lemahnya pengendalian anggaran dan berpotensi menimbulkan tekanan fiskal terhadap keuangan daerah di masa mendatang (Sari & Pratolo, 2021).

Sebaliknya, pada tahun 2020 dan 2023 rasio efisiensi berada pada kategori cukup efisien. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian belanja daerah dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, efisiensi belanja kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga belanja lebih diarahkan pada program prioritas dan penghematan dilakukan pada kegiatan yang kurang mendesak. Sementara itu, pada tahun 2023 meskipun efektivitas pendapatan mengalami penurunan, pengendalian belanja relatif lebih baik sehingga rasio efisiensi masuk kategori cukup efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, dengan menyesuaikan belanja terhadap kemampuan fiskal yang tersedia.

Fluktuasi Tingkat efisiensi belanja daerah selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Hasil ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2021) yang menyatakan bahwa efisiensi belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan program, serta efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Tanpa pengendalian yang memadai, belanja daerah berpotensi tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Meskipun pada beberapa tahun pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menunjukkan perbaikan dalam efisiensi belanja, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam pengendalian anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penetapan prioritas program yang lebih selektif, serta penguatan sistem pengawasan agar penggunaan anggaran benar-benar efisien dan selaras dengan kemampuan pendapatan daerah.

c. Keterkaitan Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja

Efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat efektivitas pendapatan yang rendah akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai belanja, sementara belanja yang tidak efisien akan memperburuk kondisi keuangan daerah meskipun pendapatan berhasil direalisasikan (Halim & Kusufi, 2020)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat efektivitas pendapatan menurun, seperti pada tahun 2023, efisiensi belanja juga belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara input dan output perlu diperbaiki. Output berupa realisasi PAD dan hasil pembangunan belum sepenuhnya sebanding dengan input berupa anggaran yang digunakan. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah dalam

merealisasikan PAD sesuai target dan mengelola belanja daerah secara efisien menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasan dan Firdaus (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi APBD merupakan indikator utama dalam menilai kinerja fiskal pemerintah daerah. Lebih lanjut, realisasi PAD merupakan instrument penting dalam menjalankan program prioritas dan pembangunan ekonomi (Hak & Marlina, 2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai efektivitas dan efisiensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kondisi yang cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Tingkat efektivitas realisasi pendapatan daerah pada periode 2019–2022 berada pada kategori cukup efektif karena rasio efektivitas berada di atas 90 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mampu mendekati target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2023 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi kurang efektif akibat ketidaksesuaian antara target dan realisasi pendapatan yang kemungkinan dipengaruhi oleh over estimasi target serta masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, tingkat efisiensi realisasi belanja daerah selama periode penelitian menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, di mana pada beberapa tahun belanja tergolong kurang efisien bahkan tidak efisien karena tingginya penggunaan anggaran, sedangkan pada tahun lainnya menunjukkan perbaikan menjadi cukup efisien. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja memiliki keterkaitan yang erat dalam mencerminkan kinerja keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan perencanaan pendapatan serta pengendalian belanja agar pengelolaan APBD dapat lebih seimbang, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi realisasi APBD, seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, serta penerapan anggaran berbasis kinerja sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian, tidak

hanya satu daerah, tetapi juga membandingkan beberapa kabupaten/kota agar diperoleh hasil yang lebih representative dan disarankan menggunakan periode waktu yang lebih Panjang agar dapat melihat tren efektivitas dan efisiensi anggaran secara lebih stabil dan mendalam

3. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode analisis yang lebih beragam, seperti analisis regresi atau metode kuantitatif lainnya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi secara lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Manual, U., Brämsswig, K., Ploner, F., Martel, A., Bauernhofer, T., Hilbe, W., Kühr, T., Leitgeb, C., Mlineritsch, B., Petzer, A., Seebacher, V., Stöger, H., Girschikofsky, M., Hochreiner, G., Ressler, S., Romeder, F., Wöll, E., Brodowicz, T., ... Baker, D. (2022).
- Armono, D., & Widiyaningsih, N. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020 Universitas Amikom Yogyakarta. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(2), 323–331.
- BPKP NTB. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2023*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. (2023). *Kabupaten Lombok Barat*. <https://lombokbaratkab.bps.go.id>
- BPS Lombok Barat. (2024). *Lombok Barat dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://lombokbaratkab.bps.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Data APBD Pemerintah Daerah*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Febrianti, R., Kusumadewi, R., & Setiowati, N. E. (2024). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pagu Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kota / Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Periode 2020 – 2021*. 04(01).
- Habibi, H., Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 483–489. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75>
- Hak, M. B. U., & Marlina, N. (2023). The Contribution of Regional Tax to Regional Original Income of West Nusa Tenggara Province in 2018-2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1).
- Halim, A., Kusufi, M. S., & Nugroho, L. (2020). Evaluasi perencanaan anggaran pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, T., & Yusuf, A. (2021). Implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi APBD. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(2), 115–128.
- Hasan, R., & Firdaus, M. (2023). Analisis kinerja fiskal daerah melalui efektivitas PAD dan efisiensi belanja APBD. *Jurnal Keuangan Publik*.
- Kurniawan, D. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi APBD Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 34–46.
- Lestari, A. S. A., & Nugraeni. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(2), 1228–1238. <https://www.jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/view/4082>
- Mahmudi. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manajemen, J., & Vol, A. (2022). *No Title*. 2(1).
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara*. 5(2), 105–113. *Naspub Slamet Riyadi-C0120036.pdf*. (n.d.).
- Ningsih, R., & Lestari, D. (2022). Pengaruh kapasitas SDM terhadap efektivitas pengelolaan APBD daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 6(2), 77–89.
- Pappa, L., Menne, F., & Suriani, S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar. *Indonesian Journal*